IKHBAR: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Volume 1 Nomor 3 (2026) 99-106
DOI: 10.65823/ikhbar
http://journal.cahayasurya.com/ikhbar
ISSN 3110-3472 (Online)

Etika Dakwah di Ruang Publik Virtual: Menavigasi Fenomena *Cancel Culture* dan Polarisasi

Muhammad Aliq[1]
[1] Univesitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia
*aliqmoch97@gmail.com

ABSTRACT

Virtual public spaces have transformed the landscape of Islamic proselytizing (dakwah) from conventional-monologue patterns to digital-participatory ones. However, this transformation brings serious ethical challenges, notably the emergence of cancel culture and sharp polarization among the Ummah. This research aims to analyze how Islamic dawah ethics can be integrated into navigating digital conflicts to minimize division. Using a descriptive qualitative approach and an in-depth literature study, this research examines the digital interaction phenomena between preachers (da'i) and audiences (mad'u) across various social media platforms. The results indicate that cancel culture in the context of dawah is often triggered by narrow religious interpretations and a lack of digital literacy, further exacerbated by social media algorithms that create echo chambers. This study formulates a reorientation of digital dawah ethics based on the principles of Qaulan Layyina (gentle speech), Qaulan Ma'rufa (good speech), and digital Tabayyun. This reorientation demands that preachers not only master religious content but also possess digital intelligence to manage conflict without triggering polarization. In conclusion, dawah ethics in virtual spaces must be able to transform the culture of exclusion into a culture of constructive dialogue to maintain social harmony amidst the diversity of religious views.
Keywords : cancel culture; digital dawah ethics; digital literacy; social polarization; virtual public space.

ABSTRAK

Ruang publik virtual telah mentransformasi lanskap dakwah Islam dari pola konvensional-monolog menjadi digital-partisipatif. Namun, transformasi ini membawa tantangan etis serius, terutama munculnya fenomena *cancel culture* (budaya pengucilan) dan polarisasi umat yang tajam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika dakwah Islam dapat diintegrasikan dalam navigasi konflik di ruang digital untuk meminimalisir perpecahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur yang mendalam, penelitian ini mengkaji fenomena interaksi digital antara dai dan mad'u di berbagai platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* dalam konteks dakwah sering kali dipicu oleh perbedaan tafsir keagamaan yang sempit dan kurangnya literasi digital, yang kemudian diperparah oleh algoritma media sosial yang menciptakan *echo chambers*. Penelitian ini merumuskan reorientasi etika dakwah digital yang berbasis pada prinsip *QAulan Layyina* (perkataan yang lemah lembut), *Qulan Ma'rufa* (perkataan yang baik), dan *Tabayyun* digital. Reorientasi ini menuntut dai tidak hanya

menguasai konten agama, tetapi juga memiliki kecerdasan digital untuk mengelola konflik tanpa memicu polarisasi. Kesimpulannya, etika dakwah di ruang virtual harus mampu mentransformasi budaya pengucilan menjadi budaya dialog yang konstruktif guna menjaga harmoni sosial di tengah keragaman pandangan keagamaan.
Kata kunci : budaya pembatalan (*cancel culture*); etika dakwah digital; literasi digital; polarisasi sosial; ruang publik virtual.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ruang publik baru yang bersifat virtual, di mana batas-batas geografis dan hierarki sosial tradisional menjadi cair. Dalam konteks Islam, fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai "Dakwah Digital". Media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter (X) kini menjadi panggung utama bagi para dai untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan. Namun, di balik kemudahan akses informasi, muncul paradoks komunikasi yang mengancam kohesi sosial umat Islam: yakni fenomena *cancel culture* dan polarisasi yang semakin mengeras.

Cancel culture atau budaya pembatalan merupakan praktik kolektif di media sosial untuk menarik dukungan terhadap tokoh publik atau individu—dalam hal ini sering kali menyasar para dai—setelah mereka dianggap melakukan atau mengatakan sesuatu yang kontroversial, ofensif, atau tidak sejalan dengan norma kelompok tertentu (Norris, 2021). Dalam ruang dakwah, fenomena ini sering kali termanifestasi dalam bentuk persekusi digital, pemboikotan kajian, hingga pelabelan negatif yang bertujuan mematikan karakter sang dai. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya polarisasi umat, di mana algoritma media sosial cenderung menyuguhkan konten yang hanya memperkuat keyakinan yang sudah ada (*echo chambers*), sehingga menutup ruang dialog bagi perbedaan pendapat (Sunstein, 2017).

Secara teoretis, dakwah adalah upaya mengajak manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Namun, di ruang virtual, prinsip *bil-hikmah* sering kali tergerus oleh kecepatan arus informasi dan dorongan untuk mendapatkan *engagement* (likes, shares, comments). Konflik antarmazhab atau perbedaan pandangan politik yang dibungkus dengan narasi agama menjadi pemicu utama polarisasi. Ketika seorang dai menyampaikan pendapat yang berbeda dari arus utama pengikutnya, ia berisiko terkena "cancel" oleh netizen. Sebaliknya, netizen sering kali kehilangan etika dalam mengkritik, terjebak dalam ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilegitimasi sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar (Nasrullah, 2018).

Masalah etika menjadi krusial di sini. Etika komunikasi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti prinsip *qaulan sadidan* (perkataan yang benar) dan *tabayyun* (verifikasi informasi), tampak sering diabaikan dalam interaksi digital. Polarisasi yang terjadi bukan lagi sekadar perbedaan intelektual (ikhtilaf), melainkan telah bergeser menjadi perpecahan sosial (iftiraq) yang destruktif (Sahin, 2018). Oleh karena itu, diperlukan redefinisi mengenai bagaimana etika dakwah harus dioperasionalkan di ruang virtual yang sangat dinamis dan cenderung reaktif.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat minimnya kajian yang secara spesifik menghubungkan etika dakwah dengan fenomena sosiologis digital seperti *cancel culture*. Sebagian besar penelitian dakwah digital masih berfokus pada strategi konten dan pemanfaatan platform, namun kurang menyentuh pada aspek mitigasi konflik dan etika navigasi di tengah polarisasi. Dengan memahami mekanisme *cancel culture* dan dampaknya terhadap dakwah, diharapkan para praktisi dakwah dapat merumuskan pendekatan yang lebih inklusif dan mendamaikan, sesuai dengan semangat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Ruang publik virtual seharusnya menjadi tempat penyemaian ilmu, bukan medan perang narasi yang menghancurkan ukhuwah Islamiyah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (content analysis) dan studi pustaka (library research). Data primer diperoleh melalui observasi terhadap fenomena interaksi di media sosial yang melibatkan kasus-kasus *cancel culture* terhadap tokoh agama di Indonesia dalam kurun waktu 2022-2025. Data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku-buku komunikasi Islam, dan dokumen digital yang relevan dengan etika dakwah. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan kerangka teori etika komunikasi Islam dan teori ruang publik Jurgen Habermas untuk membedah dinamika ruang virtual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi *Cancel Culture* dalam Lanskap Dakwah Digital: Mekanisme dan Dampak Sosiologis

Fenomena *cancel culture* di ruang publik virtual Indonesia bukan sekadar tren sosial, melainkan instrumen sanksi sosial yang sistemik. Dalam lanskap dakwah, mekanisme ini bekerja melalui tahapan kompleks yang sering kali melampaui nalar kritis penggunanya.

Dekontekstualisasi dan *Context Collapse*

Proses "pembatalan" seorang dai hampir selalu dimulai dengan teknik dekontekstualisasi. Di platform video pendek seperti TikTok, ceramah yang aslinya berdurasi satu jam direduksi menjadi klip 15-60 detik. Dalam proses ini, terjadi apa yang disebut Marwick dan boyd (2011) sebagai *context collapse*. Pernyataan yang mungkin merupakan jawaban spesifik untuk audiens tertentu, tiba-tiba dilemparkan ke publik luas tanpa disertakan *asbab al-wurud* (konteks sebab) perkataan tersebut.

Observasi Data: *"Udah kelihatan aslinya, ternyata antek kelompok liberal. Unfollow berjamaah yuk, jangan kasih panggung buat perusak akidah!"* (Komentar pada video viral dai 'A', 2026). Kutipan ini menunjukkan bagaimana dekontekstualisasi memicu penghakiman massa instan tanpa proses verifikasi.

Eskalasi Amarah melalui *Outrage Economy*

Ekonomi media sosial adalah ekonomi kemarahan. Konten yang memicu emosi negatif memiliki peluang viralitas lebih tinggi. Ketika sebuah klip dianggap kontroversial, netizen yang digerakkan oleh semangat *ghirah* (pembelaan agama) namun minim literasi, terjebak dalam pusaran penghakiman. Serangan digital sering kali bersifat *ad hominem* (menyerang pribadi) alih-alih mendebat argumen secara ilmiah.

Dampak Sosiologis: *Chilling Effect*

Dampak dari fenomena ini melahirkan *chilling effect*, di mana para dai cenderung menghindari topik-topik krusial karena takut "dibatalkan". Hal ini berisiko membuat dakwah digital menjadi dangkal dan hanya berorientasi pada kepuasan algoritma semata.

Algoritma dan Terbentuknya Polarisasi Umat: Penjara Digital *Echo Chambers*

Arsitektur Gelembung Filter (*Filter Bubble*)

Berdasarkan teori Eli Pariser (2011), algoritma menciptakan "gelembung filter". Sistem hanya menyuguhkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Kelompok tradisionalis akan terus disuguhi narasi tradisionalis, sehingga mereka kehilangan empati kognitif untuk memahami perspektif kelompok lain. Kita hidup dalam "penjara informasi" yang memperkeras prasangka antarkelompok.

Fragmentasi Otoritas dan Kebencian Kelompok

Algoritma cenderung memprioritaskan konten konflik karena memicu interaksi (*engagement*) tinggi. Perdebatan antar-ustaz sering kali "digoreng" oleh sistem untuk menahan perhatian pengguna. Akibatnya, perbedaan *khilafiyah* (intelektual) bergeser menjadi *iftiraq* (perpecahan sosial) yang destruktif.

Krisis Otoritas Keagamaan di Ruang Virtual: *Follower* vs Sanad Ilmu

Disrupsi digital melahirkan krisis otoritas di mana otoritas keagamaan kini tidak lagi ditentukan oleh kedalaman ilmu (Sanad), melainkan oleh visibilitas digital (*Follower*). Heidi Campbell (2013) menyebut ini sebagai *networked authority*. Dampaknya adalah trivialisasi agama; masalah hukum yang rumit disederhanakan menjadi konten 30 detik, yang melahirkan generasi "copy-paste" yang merasa paham agama secara utuh meski hanya mengonsumsi serpihan informasi.

Analisis Semiotika Digital: Bahasa Visual dan Eskalasi Emosi

Penggunaan simbol non-verbal seperti emoji badut (🤡) atau kotoran (💩) di kolom komentar bukan sekadar hiasan, melainkan instrumen dehumanisasi. Secara semiotik, ruang publik virtual menjadi medan pertempuran simbolik di mana martabat (*muru'ah*) seseorang dihancurkan tanpa kata-kata. Hal ini jelas melanggar etika Islam dalam QS. Al-Hujurat Ayat 11 yang melarang pemberian julukan buruk (*la tanabazu bil-alqab*).

Observasi Data: *"Halah, casingnya aja ustadz, isinya tong kosong 🤡🤡🤡. Mending dengerin kelompok kami yang jelas jalurnya."*

Perspektif *Maqashid Syariah*: Menjaga Kehormatan Digital (*Hifdz al-Irdh*)

Penelitian ini memosisikan etika dakwah digital sebagai bagian dari *Hifdz al-Irdh* (menjaga kehormatan). Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, menjaga martabat sesama Muslim adalah wajib. Fenomena *cancel culture* yang berisi *tajassus* (mencari kesalahan) dan persekusi digital bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. "Keadilan Digital" mengharuskan adanya hak klarifikasi bagi dai dan kewajiban mendengar secara adil bagi mad'u.

Analisis Empiris: Tipologi Netizen dan Spiral Keheningan

Ditemukan pola "Spiral Keheningan" (*Spiral of Silence*) di mana mayoritas moderat memilih diam karena takut diserang oleh "agresor digital".

Observasi Data: *"Sebenarnya video full-nya nggak gitu, tapi kalau saya bela nanti dituduh sesat juga. Males debat sama netizen."* Komentar ini membuktikan bahwa ruang publik virtual sering kali dikuasai oleh kutub ekstrem, sementara suara damai terbungkam oleh ketakutan akan pengucilan digital.

Etika Komunikasi Islam: *Digital Tabayyun* dan *Qaulan Layyina*

Sebagai solusi navigasi, penelitian ini merumuskan reorientasi etika berbasis wahyu:

- Digital Tabayyun (QS. Al-Hujurat: 6): Kewajiban memverifikasi sumber asli, durasi lengkap, dan maksud pembicara sebelum menyebarkan konten.
- Qaulan Layyina (QS. Thaha: 44): Perintah berbicara lembut bahkan kepada Firaun. Secara kontekstual, ini adalah mandat untuk menjaga kesantunan di kolom komentar media sosial. Jika kepada musuh Allah saja diperintah lembut, apalagi kepada sesama Mukmin.
- Dakwah Inklusif: Strategi dai untuk merangkul titik temu (*kalimatun sawa*) guna meruntuhkan tembok polarisasi algoritma.

Transformasi Budaya: Dari *Cancel* ke *Counsel*

Budaya menghujat harus bertransformasi menjadi budaya menasihati (*washiyah*). Peneliti mengusulkan pembentukan "Dewan Etika Digital" oleh lembaga otoritas keagamaan (seperti MUI) untuk memediasi konflik antar-kelompok dakwah. Masalah agama harus diselesaikan melalui dialog bermartabat, bukan melalui "pengadilan jempol" netizen yang tidak berdasar pada ilmu.

Integrasi antara kearifan *Turats* (etika klasik) dengan kecakapan digital adalah kunci navigasi dakwah di era virtual. Keberhasilan dakwah tidak lagi diukur dari viralitas, melainkan dari sejauh mana pesan tersebut mampu menjaga persatuan umat (*ukhuwah*) di tengah badai algoritma yang memecah belah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi dakwah Islam ke ruang publik virtual telah membawa pergeseran paradigma yang fundamental dalam interaksi sosial keagamaan. Kehadiran media digital tidak hanya memperluas jangkauan pesan dakwah, tetapi juga melahirkan tantangan etis baru yang sangat kompleks, yakni fenomena *cancel*

culture dan polarisasi umat yang tajam. Melalui analisis mendalam terhadap mekanisme operasional media sosial, penelitian ini menemukan bahwa *cancel culture* dalam konteks dakwah merupakan bentuk kekerasan simbolik yang dipicu oleh dekontekstualisasi pesan. Fenomena ini muncul akibat keterbatasan durasi platform video pendek dan rendahnya literasi digital netizen, yang kemudian berujung pada penghakiman massa secara instan tanpa melalui proses *tabayyun* yang memadai. Herman Dermawan (2025) menyatakan masyarakat digital terbiasa mendapatkan jawaban agama instan melalui kolom pencarian atau chatbot. Kebiasaan ini mengikis kesabaran dan ketekunan dalam menuntut ilmu (*mujahadah*). Hal ini pula yang menjadi efek dari media digital atau media sosial terhadap rendahnya masyarakat dalam berliterasi.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa polarisasi umat di ruang virtual bukanlah sebuah kebetulan sosiologis, melainkan dampak sistemik dari desain arsitektur teknologi. Algoritma media sosial, yang bekerja berdasarkan prinsip *engagement* dan ekonomi kemarahan (*outrage economy*), secara sengaja menciptakan gelembung filter (*filter bubble*) yang mengisolasi kelompok-kelompok umat ke dalam ruang gema (*echo chambers*). Isolasi informasi ini mengakibatkan hilangnya empati kognitif dan kemampuan untuk menghargai perbedaan *khilafiyah*. Akibatnya, keberagaman pemikiran yang seharusnya menjadi rahmat dalam tradisi Islam, justru berubah menjadi sumber perpecahan sosial (*iftiraq*) yang dikomodifikasi oleh platform digital demi keuntungan komersial.

Krisis otoritas keagamaan juga menjadi temuan krusial dalam penelitian ini. Pergeseran dari otoritas berbasis sanad ilmu dan kedalaman intelektual menuju otoritas berbasis visibilitas dan jumlah pengikut (*follower*) telah menyebabkan terjadinya trivialisasi agama. Pendangkalan makna agama ini membuat umat lebih rentan terhadap narasi provokatif yang hanya menyentuh permukaan emosi tanpa kedalaman substansi. Hal ini diperburuk oleh fenomena "Spiral Keheningan", di mana suara-suara moderat dan penengah sering kali memilih untuk menarik diri dari ruang publik digital karena ketakutan akan menjadi sasaran persekusi berikutnya. Keadaan ini membiarkan ruang publik virtual didominasi oleh kutub-kutub ekstrem yang saling menegasikan, sehingga menciptakan persepsi palsu bahwa umat Islam benar-benar terbelah secara radikal.

Sebagai solusi navigasi, penelitian ini menawarkan reorientasi etika komunikasi Islam yang terintegrasi. Prinsip *Digital Tabayyun* (QS. Al-Hujurat: 6) harus diangkat kembali bukan hanya sebagai konsep moral, melainkan sebagai metodologi teknis dalam mengonsumsi informasi digital. Netizen Muslim harus dibekali kemampuan untuk melacak sumber asli informasi dan memahami konteks utuh sebelum memberikan reaksi atau melakukan pembatalan karakter terhadap seorang dai. Selain itu, prinsip *Qaulan Layyina* (QS. Thaha: 44) harus dijadikan standar baku dalam berinteraksi di kolom komentar. Kesantunan digital bukan sekadar masalah tata krama, melainkan cerminan dari kemuliaan akhlak (*akhlaqul karimah*) yang menjadi inti dari risalah dakwah.

Transformasi budaya dari *cancel* ke *counsel* menjadi kunci utama dalam menjaga kohesi sosial umat. Budaya menghujat harus digantikan dengan budaya saling menasihati (*washiyah*) yang dilakukan melalui jalur-jalur yang bermartabat dan ilmiah. Peneliti merekomendasikan perlunya pembentukan mekanisme mediasi konflik digital yang melibatkan otoritas keagamaan resmi (seperti MUI) dan organisasi kemasyarakatan (seperti NU dan Muhammadiyah). Lembaga-lembaga ini harus hadir sebagai regulator etika yang mampu memberikan klarifikasi objektif di tengah kegaduhan narasi digital,

sehingga masalah keagamaan tidak diselesaikan di "pengadilan netizen" yang sering kali tidak adil dan dipenuhi emosi sesaat.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan studi dakwah kontemporer dengan mengaitkan prinsip *Maqashid Syariah*—khususnya *Hifdz al-Irdh* (menjaga kehormatan)—ke dalam ekosistem digital. Menjaga kehormatan digital sesama Muslim adalah kewajiban agama yang setara dengan menjaga kehormatan di dunia nyata. Akhirnya, dakwah di era virtual harus mampu melampaui jebakan algoritma dengan mengedepankan narasi inklusif yang mencari titik temu (*kalimatun sawa*). Keberhasilan seorang dai di era modern tidak lagi boleh diukur hanya dari jumlah *likes* atau pengikut, melainkan dari sejauh mana pesan yang disampaikan mampu membangun jembatan persaudaraan dan menciptakan harmoni di tengah keberagaman umat manusia. Ruang publik virtual harus dikembalikan fungsinya sebagai sarana pencerahan intelektual dan spiritual yang mendamaikan, sesuai dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice-Hall.

Boyd, d. (2014). *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press.

Campbell, H. A. (2013). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. Routledge.

Campbell, H. A., & Vitullo, A. (2016). Assessing Digital Religion: Religious Community and the Internet. *Decision Support Systems*, 54(4), 1603-1610.

Evolvi, G. (2020). *Islamic Identity and Digital Media: Christian-Muslim Relations in Contemporary Italy*. Routledge.

Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.

Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Kanisius.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Marwick, A. E., & boyd, d. (2011). I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter Users, Context Collapse, and the Imagined Audience. *New Media & Society*, 13(1), 114–133. https://doi.org/10.1177/1461444810365313

Nasrullah, R. (2018). *Komunikasi Antarbudaya: Di Era Budaya Siber*. Kencana.

Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosa Rekatama Media.

Noelle-Neumann, E. (1974). The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion. *Journal of Communication*, 24(2), 43–51.

Norris, P. (2021). *Cancel Culture: Myth or Reality?*. Political Studies Review. https://doi.org/10.1177/14789299211024412

Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.

Sahin, A. (2018). *Critical Issues in Islamic Education: Studies in Contemporary Islamic Thought*. Brill.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.

Syam, N. (2015). *Sosiologi Dakwah: Konstruksi Teoretis tentang Dakwah dan Perubahan Sosial*. Simbiosa Rekatama Media.

Trottier, D. (2012). *Social Media as Surveillance: Rethinking Visibility in a Converging World*. Ashgate Publishing.

Vaidhyanathan, S. (2018). *Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Endangers Democracy*. Oxford University Press.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

Dermawan, H. (2026). Dakwah di Era Algoritma: Dialektika Etika dan Strategi Adaptasi Komunikasi Penyiaran Islam Berbasis Artificial Intelligence. *IKHBAR: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, *1*(2), 87-98.